

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kondisi Penggunaan Lahan Eksisting di Kampung Tabalar Ulu

Penggunaan lahan eksisting di Kampung Tabalar Ulu terdiri dari beberapa kategori, yaitu perkebunan, pemukiman, hutan, dan pertanian. Luasan masing-masing penggunaan lahan adalah sebagai berikut: hutan lindung seluas 9,613.8 hektar, kebun sawit seluas 3,236.5 hektar, hutan seluas 12,588.5 hektar, pemukiman seluas 127.1 hektar, pertanian lahan kering seluas 68.8 hektar, dan hutan produksi terbatas seluas 586.5 hektar. Data ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penggunaan lahan yang mencerminkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

2. Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting dengan RTRW Kabupaten Berau Tahun 2024

Tingkat kesesuaian penggunaan lahan eksisting dengan RTRW Kabupaten Berau masih relatif rendah. Nilai *Overall Accuracy* sebesar 48,6% menunjukkan bahwa kurang dari separuh pemanfaatan ruang aktual sesuai dengan arahan rencana tata ruang. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan ketidaksesuaian yang cukup signifikan, bahkan menunjukkan arah pemanfaatan ruang yang berlawanan dengan ketentuan RTRW. Hasil analisis per kelas juga memperlihatkan pola ketidaksesuaian yang konsisten. Pada kelas sesuai, akurasi relatif lebih baik dengan nilai PA dan UA sebesar 63,3%, yang berarti sebagian besar kawasan yang direncanakan sesuai memang terealisasi di lapangan. Namun, masih terdapat sekitar 36,7% kawasan yang menyimpang dari peruntukannya. Sementara itu, pada kelas tidak sesuai, nilai akurasi sangat rendah (PA dan UA hanya 14,3%), menandakan bahwa hampir semua kawasan yang seharusnya dibatasi pemanfaatannya justru digunakan untuk kegiatan lain. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya efektivitas RTRW Kabupaten Berau dalam menahan laju konversi lahan dan menjaga fungsi ruang sesuai dengan zonasi yang direncanakan.

3. Hal-Hal yang Mempengaruhi Kesesuaian atau Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan di Kampung Tabalar Ulu

Rendahnya kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan RTRW disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, demografis, kelemahan tata kelola, serta pendekatan perencanaan yang kurang partisipatif. Tekanan ekonomi

masyarakat mendorong pemanfaatan lahan untuk kebutuhan jangka pendek seperti pertanian dan perkebunan, meskipun tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang lebih cepat dari proyeksi perencanaan juga menimbulkan lonjakan permintaan lahan yang tidak dapat diakomodasi oleh RTRW yang sifatnya statis. Keterbatasan pengawasan dan lemahnya penegakan aturan membuat implementasi RTRW di lapangan tidak konsisten, sehingga banyak aktivitas pemanfaatan ruang berlangsung tanpa kendali. Ditambah lagi, perbedaan antara kebutuhan nyata masyarakat dengan ketentuan RTRW menimbulkan kesenjangan yang semakin memperlemah efektivitas dokumen tata ruang. Dengan demikian, RTRW Kabupaten Berau perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, diperkuat oleh mekanisme pengawasan yang tegas, serta disusun dengan pendekatan partisipatif sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai RTRW kepada masyarakat setempat. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau penyuluhan yang melibatkan masyarakat, sehingga mereka memahami pentingnya kesesuaian penggunaan lahan dan dampak dari ketidaksesuaian terhadap lingkungan dan kesejahteraan.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan lahan, terutama untuk mencegah konversi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lahan harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

3. Perencanaan Infrastruktur yang Terintegrasi

Perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pemukiman dan aksesibilitas. Pengembangan infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan pemukiman yang terencana dan mengurangi tekanan terhadap lahan hutan dan pertanian.

4. Pengembangan Program Pertanian Berkelanjutan

Untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, perlu adanya program pemberdayaan petani yang fokus pada praktik pertanian berkelanjutan. Pelatihan dan akses terhadap teknologi pertanian modern dapat membantu meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.

5. Penerapan Teknologi Pemetaan dan Monitoring

Penggunaan teknologi pemetaan, seperti drone dan Sistem Informasi Geografis (SIG), harus dimanfaatkan untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara berkala. Data yang akurat dan terkini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan lahan.

6. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan. Pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terakomodasi.

7. Penyusunan Kebijakan yang Responsif

Kebijakan terkait penggunaan lahan harus disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada.